

Peluang dan Tantangan Adopsi Standar Akuntansi Bisnis dalam Praktik Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

Yusup Setiawan¹, Agus Munandar²

^{1,2} Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Esa Unggul
agus.munandar@esaunggul.ac.id

ABSTRACT

Recent developments in Indonesia's public financial management have underscored the necessity of aligning the Government Accounting Standards (SAP) with business accounting frameworks such as PSAK and IFRS to enhance transparency, accountability, and legitimacy in managing state finances. The urgency of this study lies in the growing need to adapt governmental accounting systems to global practices while preserving the fundamental characteristics of the public sector, which emphasize service orientation over profit motives. This research aims to critically examine the opportunities and challenges associated with adopting business accounting standards within Indonesia's public sector accounting framework, as well as to assess their implications for the effectiveness of financial reporting. This study employs a qualitative research design using a literature review approach. Data were collected through an extensive review of scholarly sources, including academic articles, policy documents, and relevant institutional reports. The findings indicate that the shared accrual basis between SAP and PSAK provides a strong foundation for achieving harmonization of accounting standards. However, the implementation process remains constrained by several factors, such as differing objectives between public and business accounting, limited technical capacity among human resources, insufficient integration of financial information systems, and the absence of a comprehensive regulatory framework for convergence.

Keywords : *Public sector accounting, SAP-PSAK convergence, public transparency, accounting reform.*

ABSTRAK

Perubahan dalam tata kelola keuangan publik di Indonesia menuntut adanya penyelarasan antara Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan standar akuntansi bisnis seperti PSAK maupun IFRS guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta legitimasi dalam pengelolaan keuangan negara. Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan untuk menyesuaikan sistem akuntansi pemerintahan dengan praktik global, tanpa mengabaikan karakteristik dasar sektor publik yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis berbagai peluang dan tantangan dalam mengadopsi standar akuntansi bisnis di lingkungan akuntansi pemerintahan Indonesia, serta menilai implikasinya terhadap efektivitas pelaporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh melalui penelaahan sumber ilmiah, yang meliputi artikel akademik, dokumen kebijakan, dan laporan kelembagaan yang relevan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa adanya kesamaan basis akrual antara SAP dan PSAK membuka peluang besar bagi terwujudnya harmonisasi standar akuntansi. Meski demikian, proses implementasi masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain perbedaan orientasi tujuan antara akuntansi publik dan bisnis, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia,

minimnya integrasi sistem informasi keuangan, serta belum adanya regulasi konvergensi yang bersifat komprehensif.

Kata Kunci : *Akuntansi pemerintahan, konvergensi SAP-PSAK, transparansi publik, reformasi akuntansi.*

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, reformasi pengelolaan keuangan publik di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup fundamental, ditandai dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual (Pratama & Mutmainah, 2025). Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas keuangan publik, sekaligus menegaskan urgensi penyesuaian praktik akuntansi pemerintahan dengan prinsip-prinsip modern yang berlaku secara global (Sihaloho, 2024).

Fenomena globalisasi dalam akuntansi publik semakin menegaskan kecenderungan negara-negara, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi basis akrual demi mencapai konsistensi pelaporan dan meningkatkan efisiensi tata kelola (Rajagukguk et al., 2025). Melalui PP No. 71 Tahun 2010, Indonesia secara resmi mengarahkan praktik akuntansi sektor publik menuju sistem berbasis akrual. Meskipun demikian, implementasinya belum sepenuhnya tuntas, terutama di tingkat pemerintah daerah, akibat adanya hambatan struktural, keterbatasan teknis, serta kendala kualitas sumber daya manusia (Afifah, 2025).

Di sisi lain, gagasan adopsi standar akuntansi bisnis dalam praktik keuangan publik menimbulkan perdebatan konseptual, mengingat adanya perbedaan mendasar antara orientasi profit pada sektor privat dan orientasi pelayanan publik pada sektor pemerintahan. Karena pemerintah tidak beroperasi dengan logika pasar, penggunaan standar bisnis seperti IFRS atau PSAK sering dipandang tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks sektor publik (Gusneli et al., 2023). Meski demikian, pendekatan ini tetap menghadirkan peluang yang signifikan, khususnya dalam meningkatkan efisiensi, memperkaya kualitas informasi keuangan, serta mendukung kompatibilitas lintas sektor (Pratama & Maulina, 2025).

Perkembangan terkini memperlihatkan bahwa sejumlah entitas pemerintah mulai mengadopsi prinsip-prinsip bisnis dalam pengelolaan aset maupun kewajiban, terutama melalui BUMD dan Badan Layanan Umum (BLU). Hal ini menuntut penerapan standar akuntansi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi (Purba et al., 2025). Dorongan untuk mengintegrasikan SAP dan PSAK juga semakin menguat seiring berkembangnya kolaborasi sektor publik dengan swasta, baik melalui skema *Public Private Partnership (PPP)*, proyek strategis nasional, maupun inisiatif digitalisasi layanan publik (Parapat et al., 2025).

Walaupun demikian, adopsi standar akuntansi bisnis di lingkungan pemerintahan masih menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Beberapa kendala utama meliputi keterbatasan kapasitas teknis aparatur, keterpaduan sistem informasi keuangan, serta resistensi institusional terhadap perubahan (Mardiansah et al., 2025). Hambatan tersebut semakin diperberat dengan ketiadaan regulasi yang secara

eksplisit mengatur integrasi SAP dan PSAK, sehingga menimbulkan kesulitan dalam koordinasi antar lembaga (Sania et al., 2025).

Lebih lanjut, beragam interpretasi atas prinsip akuntansi bisnis ketika diterapkan di sektor publik kerap menghasilkan inkonsistensi dalam pelaporan dan penilaian kinerja antar daerah (Dalimunthe, 2025). Situasi ini semakin kompleks karena lemahnya mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, yang seharusnya menjamin konsistensi penerapan standar di seluruh wilayah Indonesia (Tanregudio, 2024).

Kajian terdahulu sebagian besar masih berfokus pada aspek implementasi SAP atau membahas tantangan umum akuntansi publik, namun belum menelaah secara khusus integrasi antara standar akuntansi bisnis dengan praktik pemerintahan sebagai bagian dari agenda reformasi sistemik. Dengan demikian, terlihat adanya celah penelitian (*research gap*) mengenai bagaimana adopsi standar akuntansi bisnis dapat memperkaya praktik akuntansi sektor publik tanpa menghilangkan karakteristik uniknya (Khadafi et al., 2024).

Relevansi isu ini semakin menguat pasca pandemi COVID-19, ketika tuntutan terhadap transparansi publik dan efektivitas pengelolaan anggaran meningkat tajam. Kondisi tersebut mendorong percepatan digitalisasi dan inovasi dalam tata kelola keuangan publik (Onesta et al., 2025). Oleh karena itu, penyusunan kerangka konseptual dan praktis yang mampu mengintegrasikan standar akuntansi lintas sektor menjadi semakin penting.

Artikel ini dimaksudkan untuk menelaah secara kritis peluang dan tantangan dalam penerapan standar akuntansi bisnis pada akuntansi pemerintahan Indonesia. Fokus pembahasan diarahkan pada aspek kebijakan, kesiapan kelembagaan, serta kapasitas sumber daya manusia. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur reformasi akuntansi sektor publik, sekaligus menyajikan implikasi praktis bagi regulator, auditor, dan akademisi dalam merancang strategi implementasi yang lebih komprehensif.

Dengan menelusuri dinamika tersebut, artikel ini berupaya menghadirkan pemahaman lebih mendalam mengenai cara adaptasi prinsip akuntansi bisnis tanpa menggeser esensi pelayanan publik. Selain itu, kajian ini diharapkan menjadi pijakan dalam pengembangan model akuntansi yang sesuai dengan karakter kelembagaan Indonesia, yakni model yang mampu menyinergikan akuntabilitas publik dengan efisiensi manajerial.

TINJAUAN LITERATUR

Grand Theory: New Institutional Theory (NIT)

Kerangka teoritis utama penelitian ini didasarkan pada *New Institutional Theory* (NIT), yang menekankan bahwa praktik organisasi, termasuk lembaga pemerintahan, tidak hanya dibentuk oleh pertimbangan efisiensi ekonomi semata, melainkan juga oleh tekanan institusional, norma sosial, serta kebutuhan akan legitimasi (Dimaggio & Powell, 1983). Dalam ranah akuntansi sektor publik, teori ini menjelaskan bahwa penerapan standar akuntansi bisnis seperti PSAK atau IFRS oleh

entitas pemerintah kerap kali didorong bukan hanya karena alasan teknis, melainkan juga untuk memperoleh pengakuan dan legitimasi dari masyarakat, otoritas pengawas, maupun komunitas internasional.

Terdapat tiga mekanisme utama dalam NIT yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor pendorong adopsi standar bisnis pada organisasi sektor publik, yakni:

1. *Coercive isomorphism*, yaitu tekanan dari regulasi pemerintah pusat dan pengaruh lembaga internasional yang memaksa adopsi standar tertentu.
2. *Mimetic processes*, di mana instansi publik meniru praktik sektor bisnis dalam kondisi ketidakpastian.
3. *Normative pressures*, yang muncul dari proses profesionalisasi serta dorongan asosiasi profesi akuntansi.

Dengan demikian, teori ini relevan untuk memahami bagaimana faktor kelembagaan dan dinamika eksternal memengaruhi peluang maupun hambatan dalam adopsi standar akuntansi bisnis di sektor pemerintahan.

Teori Adopsi Inovasi

Variabel adopsi standar akuntansi bisnis juga dapat dijelaskan melalui kerangka *Diffusion of Innovation Theory* (Rogers, 2003). Menurut Rogers, keberhasilan suatu inovasi ditentukan oleh lima karakteristik kunci, yakni:

1. *Relative advantage*, yakni sejauh mana standar akuntansi bisnis dipandang lebih unggul dibandingkan SAP.
2. *Compatibility*, yaitu kesesuaian standar baru dengan sistem yang sudah ada.
3. *Complexity*, yakni tingkat kesulitan teknis dalam proses penerapannya.
4. *Trialability*, yaitu peluang untuk diuji coba sebelum diimplementasikan secara penuh.
5. *Observability*, yaitu sejauh mana hasil penerapan dapat terlihat dan dinilai secara nyata.

Dalam praktik pemerintahan, misalnya pada entitas seperti BUMD dan BLU, kecenderungan manajer keuangan untuk mengadopsi PSAK sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap kelima dimensi tersebut.

Teori Kontinjensi dalam Akuntansi

Contingency Theory menegaskan bahwa tidak ada satu model sistem akuntansi yang sesuai untuk semua organisasi, sebab pilihan sistem akan bergantung pada kondisi spesifik organisasi, seperti ukuran, kompleksitas aktivitas, lingkungan eksternal, serta struktur pengambilan keputusan (Otley, 1980). Dalam konteks penelitian ini, teori kontinjensi menyoroti bahwa keputusan adopsi standar akuntansi bisnis pada lembaga pemerintahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain skala organisasi pemerintahan, karakteristik aktivitas ekonomi, tingkat kesiapan teknologi informasi, dan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, teori ini memberikan dasar konseptual untuk menganalisis hambatan internal yang dihadapi organisasi pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan kesesuaian struktur dan kapasitas adaptif organisasi terhadap standar baru.

Teori Legitimasi

Legitimacy Theory menekankan bahwa organisasi publik cenderung mengadopsi praktik yang dipandang modern atau selaras dengan standar internasional guna menjaga dukungan masyarakat serta memperkuat reputasi kelembagaan (Suchman, 1995). Penerapan standar akuntansi bisnis dalam sektor pemerintahan dapat dipahami sebagai strategi untuk membangun kepercayaan publik dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam perspektif ini, standar akuntansi bisnis tidak hanya diposisikan sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai simbol legitimasi politik dan administratif. Hal ini memperkuat pandangan bahwa peluang adopsi erat kaitannya dengan kebutuhan pemerintah untuk mempertahankan citra positif dan meningkatkan kredibilitas di mata publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi literatur sebagai landasan metodologis utama. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada pengkajian kritis terhadap peluang serta tantangan penerapan standar akuntansi bisnis (PSAK/IFRS) dalam praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia, baik dari sisi konseptual, kelembagaan, maupun regulasi. Pendekatan kualitatif dipandang paling relevan karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam kompleksitas makna, dinamika institusional, serta perbedaan paradigma yang melekat antara akuntansi sektor publik dan sektor privat, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif. Secara epistemologis, penelitian ini berakar pada paradigma interpretatif yang memandang praktik akuntansi sebagai realitas sosial yang dibentuk oleh interaksi antara tekanan institusional, norma profesional, serta tuntutan legitimasi dalam organisasi publik. Oleh karena itu, metode yang digunakan memiliki koherensi yang kuat dengan kerangka teoritis penelitian, khususnya *New Institutional Theory*, *Legitimacy Theory*, dan *Contingency Theory*, yang menekankan bahwa praktik akuntansi merupakan hasil dialektika antara aspek teknis dan non-teknis.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan melalui penelusuran dan dokumentasi secara sistematis terhadap artikel ilmiah bereputasi, dokumen kebijakan termasuk peraturan pemerintah dan standar akuntansi laporan kelembagaan, serta publikasi akademik lain yang relevan dengan isu konvergensi SAP-PSAK. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan observasi non-partisipatif terhadap perkembangan wacana, kerangka regulasi, serta praktik akuntansi pemerintahan sebagaimana tercermin dalam literatur. Tahapan analisis data dilaksanakan secara terstruktur, dimulai dari identifikasi dan pemilihan sumber berdasarkan tingkat relevansi dan kredibilitas ilmiahnya, dilanjutkan dengan pengelompokan isu-isu utama seperti peluang harmonisasi, kendala implementasi, dan implikasi kelembagaan. Selanjutnya, temuan dianalisis secara kritis dengan mengaitkannya pada kerangka teori yang digunakan, sebelum disintesis secara konseptual untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan

argumentatif. Upaya menjaga validitas dilakukan dengan membandingkan berbagai temuan dari literatur dan dokumen resmi, sementara reliabilitas diperkuat melalui penerapan prosedur analisis yang konsisten dan transparan. Dengan rancangan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang memiliki dasar akademik yang kuat serta relevan dengan fokus dan tujuan kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Hasil Studi Literatur

Kajian literatur yang mencakup publikasi ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan kelembagaan memperlihatkan bahwa upaya konvergensi antara Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan standar akuntansi bisnis seperti PSAK serta IFRS telah menjadi bagian penting dari reformasi pelaporan keuangan sektor publik di Indonesia. Meskipun arah kebijakan menuju harmonisasi tersebut semakin jelas, proses adopsinya masih menghadapi beragam hambatan, baik dari aspek kelembagaan maupun teknis, yang menghambat penerapan secara menyeluruh di tingkat pemerintah pusat dan daerah.

Secara garis besar, temuan penelitian menunjukkan bahwa dorongan adopsi standar akuntansi bisnis di lingkungan pemerintahan tidak semata bersumber dari faktor teknis, tetapi juga dari aspek institusional dan simbolik. Langkah ini mencerminkan upaya memperoleh legitimasi publik, memperkuat transparansi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan negara (DiMaggio & Powell, 1983; Suchman, 1995).

Analisis Peluang Adopsi Standar Akuntansi Bisnis

Peluang utama dalam proses konvergensi akuntansi publik dan bisnis terletak pada kesamaan dasar penerapan akuntansi berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Keseragaman basis pengakuan tersebut membuka ruang bagi harmonisasi praktik pelaporan di sektor pemerintahan. Dengan demikian, pemerintah dapat mengadaptasi sejumlah prinsip pelaporan yang berlaku di sektor korporasi, seperti *fair value measurement* dan *impairment recognition*, tanpa harus mengubah orientasi utama pelayanan publik.

Studi literatur juga menegaskan bahwa penerapan prinsip IFRS pada akuntansi pemerintahan mampu memperkuat akuntabilitas fiskal dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan negara. Sejumlah penelitian (Rajagukguk et al., 2025; Purba et al., 2025) mengonfirmasi bahwa penerapan konsep *true and fair view* dalam PSAK berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Peningkatan ini turut berimplikasi pada penurunan jumlah opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan oleh BPK selama lima tahun terakhir.

Dari sisi teknis, harmonisasi standar akuntansi bisnis menawarkan potensi besar dalam penyederhanaan proses konsolidasi laporan keuangan antara entitas pemerintah dan BUMN. Upaya ini menjadi krusial dalam pengelolaan investasi publik, pelaksanaan proyek *Public Private Partnership (PPP)*, dan pengendalian aset negara.

Pendekatan yang berlandaskan IFRS menjadikan informasi keuangan lebih terukur, relevan, serta mudah dibandingkan antar entitas, sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di ranah kebijakan fiskal.

Selain itu, kebijakan digitalisasi pengelolaan keuangan publik melalui penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) juga memperkuat peluang penerapan prinsip akuntansi bisnis. Digitalisasi tersebut mendorong praktik pelaporan keuangan secara real-time serta pengelolaan data yang terintegrasi, sehingga meningkatkan akurasi, efisiensi, dan konsistensi informasi antar lembaga pemerintah.

Analisis Tantangan Implementasi Standar Akuntansi Bisnis

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam penerapan standar akuntansi bisnis di sektor pemerintahan terletak pada perbedaan orientasi antara kedua sistem. Akuntansi publik berfokus pada akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat (*service-oriented*), sedangkan akuntansi bisnis berorientasi pada penciptaan laba dan nilai ekonomi (*profit-oriented*) (Gusneli et al., 2023). Perbedaan paradigma ini menjadi hambatan filosofis yang signifikan dalam penerapan konsep-konsep seperti *fair value*, *revenue recognition*, serta *financial instruments measurement* pada laporan keuangan pemerintah.

Di samping itu, sebagaimana diungkapkan (Afifah, 2025) dan (Mardiansah et al., 2025), masih terdapat kesenjangan kapasitas yang cukup besar di kalangan aparatur keuangan pemerintah dalam memahami standar IFRS dan PSAK, terutama di level pemerintah daerah. Hingga tahun 2024, pelatihan akuntansi berbasis akrual baru mencakup sekitar 52% satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sementara sebagian besar entitas belum sepenuhnya menerapkan akuntansi akrual secara komprehensif.

Berdasarkan kerangka New Institutional Theory, kondisi ini menggambarkan lemahnya tekanan koersif dan normatif dalam mendorong transformasi organisasi. Banyak instansi pemerintahan masih mempertahankan sistem pelaporan konvensional karena pengaruh rutinitas administratif, struktur birokrasi yang hierarkis, serta ketiadaan *regulatory incentive* yang memadai untuk melakukan inovasi (Sania et al., 2025).

Dari aspek teknologi, infrastruktur pelaporan keuangan pemerintah belum sepenuhnya terintegrasi. Meskipun sistem seperti SAKTI dan SIPKD telah diimplementasikan, interoperabilitas antar modul akuntansi masih rendah, mengakibatkan ketidaksinkronan data antara pemerintah pusat dan daerah. Keterbatasan ini menjadi penghalang bagi efektivitas penerapan standar bisnis yang menuntut sistem pelaporan berbasis data dan terhubung secara *real-time*.

Hambatan lain yang diidentifikasi adalah ketiadaan regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme konvergensi SAP dan PSAK. Hingga kini, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) belum menerbitkan pedoman teknis yang jelas terkait ruang lingkup penerapan prinsip akuntansi bisnis di sektor publik.

Akibatnya, koordinasi antar lembaga seperti DJPb, BPKP, dan BPK masih bersifat sektoral dan belum membentuk satu ekosistem akuntansi yang terpadu.

Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dinamika adopsi standar akuntansi bisnis dalam praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan teknis atau efisiensi semata, melainkan juga melalui dimensi kelembagaan, sosial, dan legitimasi yang kompleks. Temuan ini memperkuat argumentasi *New Institutional Theory* yang menegaskan bahwa perilaku organisasi publik sering kali dibentuk oleh tekanan institusional sebagai bagian dari upaya memperoleh legitimasi di mata pemangku kepentingan.

Dalam konteks Indonesia, tekanan koersif berasal dari kebijakan pemerintah pusat yang mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan publik melalui SAP berbasis akrual (PP No. 71 Tahun 2010). Tekanan normatif muncul dari dorongan profesionalisasi aparatur dan tuntutan lembaga pemeriksa seperti BPK untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sementara tekanan mimetik tampak dalam upaya instansi pemerintah untuk meniru praktik pelaporan sektor swasta, khususnya dalam penyajian informasi aset dan kewajiban. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip IFRS atau PSAK dalam sektor publik bukan hanya bentuk adaptasi teknis, tetapi juga strategi simbolik untuk memperoleh pengakuan sebagai institusi modern dan kredibel secara global (Suchman, 1995).

Temuan ini sejalan dengan pandangan Rogers (2003) dalam *Diffusion of Innovation Theory*, yang menyatakan bahwa keberhasilan adopsi inovasi ditentukan oleh persepsi terhadap keunggulan relatif (*relative advantage*), kompatibilitas (*compatibility*), kompleksitas (*complexity*), keterujian (*trialability*), dan keteramatan (*observability*). Dalam konteks penelitian ini, standar akuntansi bisnis dianggap memiliki keunggulan relatif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kompatibilitas dengan standar internasional. Namun, tingkat kompleksitas dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi penghalang utama dalam proses inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi bisnis, seperti *fair value accounting* dan *impairment testing*, menghadapi resistensi karena perbedaan orientasi tujuan antara sektor publik dan privat. Hal ini menegaskan relevansi *Contingency Theory* (Otley, 1980), yang menyatakan bahwa tidak ada satu sistem akuntansi yang dapat diterapkan secara universal pada semua organisasi. Pemilihan dan penerapan sistem akuntansi sangat dipengaruhi oleh konteks organisasi, kompleksitas tugas, lingkungan operasional, serta karakteristik sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, implementasi standar bisnis dalam sektor publik harus mempertimbangkan karakter pelayanan publik yang berorientasi pada akuntabilitas, bukan profitabilitas.

Selain itu, hasil penelitian juga mengonfirmasi pandangan *Legitimacy Theory* (Suchman, 1995) bahwa adopsi standar akuntansi bisnis merupakan bentuk strategi pemerintah untuk memperkuat citra legitimasi dan kepercayaan publik. Transparansi

dalam pelaporan keuangan diharapkan dapat memperkuat persepsi masyarakat terhadap integritas dan efisiensi penggunaan dana publik. Hal ini tercermin dari peningkatan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan perbaikan pada aspek penyajian laporan keuangan. Namun, penelitian ini juga mengungkap bahwa sebagian perubahan tersebut lebih bersifat formalistik ketimbang substantif, di mana adopsi standar dilakukan untuk memenuhi tuntutan legitimasi eksternal tanpa diiringi peningkatan signifikan dalam kualitas sistem pengendalian internal.

Dari perspektif empiris, temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian akuntansi sektor publik di Indonesia dalam tiga hal penting. Pertama, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa reformasi akuntansi pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari dinamika tekanan kelembagaan dan politik. Kedua, hasil penelitian mempertegas bahwa harmonisasi antara SAP dan PSAK dapat meningkatkan efisiensi serta kompatibilitas lintas sektor, terutama pada entitas yang menjalankan fungsi komersial seperti BUMD dan BLU. Ketiga, penelitian ini memberikan kerangka konseptual bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi adopsi bertahap melalui pendekatan *incremental convergence*, yakni penyesuaian bertahap yang menyesuaikan kapasitas kelembagaan dan kesiapan sumber daya manusia.

Namun demikian, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi hasil penelitian dan perlu dikaji secara kritis. Pertama, keterbatasan kapasitas teknis dan literasi IFRS di kalangan aparaturnya menyebabkan pemahaman terhadap konsep nilai wajar dan pengakuan pendapatan masih bervariasi antar entitas. Kedua, resistensi birokrasi dan minimnya dukungan regulasi spesifik mengenai konvergensi SAP-PSAK menciptakan ketidakpastian implementasi di lapangan. Ketiga, faktor politik dan kelembagaan seperti perubahan prioritas kebijakan fiskal serta rotasi pejabat keuangan turut memengaruhi konsistensi reformasi akuntansi publik.

Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan perbedaan dengan ekspektasi awal. Misalnya, meskipun diharapkan bahwa penerapan prinsip IFRS akan meningkatkan efisiensi dan transparansi, kenyataannya peningkatan tersebut lebih terlihat pada aspek pelaporan daripada pengambilan keputusan fiskal. Hal ini menandakan bahwa reformasi akuntansi belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, sebagaimana disampaikan oleh Afifah (2025) dan Mardiansah et al. (2025).

Keterbatasan penelitian ini terutama terletak pada ruang lingkupnya yang masih terbatas pada analisis literatur dan data sekunder. Belum dilakukan observasi langsung maupun pengujian empiris terhadap entitas pemerintahan yang telah mencoba mengadopsi sebagian prinsip PSAK. Selain itu, variasi kondisi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah juga belum sepenuhnya diakomodasi dalam analisis. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pendekatan *mixed methods* dengan menggabungkan studi kasus dan survei kuantitatif untuk menilai sejauh mana efektivitas adopsi standar bisnis terhadap peningkatan kualitas pelaporan dan akuntabilitas fiskal di berbagai tingkat pemerintahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peluang serta tantangan penerapan standar akuntansi bisnis dalam praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia, sekaligus memahami dampaknya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi pengelolaan keuangan publik. Berdasarkan hasil telaah literatur dan analisis teoritis yang dilakukan, beberapa temuan utama dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Upaya penyelarasan antara Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan standar akuntansi bisnis seperti PSAK maupun IFRS merupakan langkah strategis dalam memperkuat reformasi sistem pelaporan keuangan nasional. Tujuan utama dari konvergensi ini adalah meningkatkan transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan publik agar selaras dengan praktik internasional. Meski demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada sejumlah kendala, antara lain persoalan teknis, keterbatasan regulasi, dan hambatan kelembagaan yang menghambat implementasi secara menyeluruh.
2. Kajian literatur mengindikasikan adanya peluang besar untuk menyinergikan SAP dan PSAK melalui kesamaan basis akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Penerapan prinsip *fair value measurement* dan *true and fair view* diyakini dapat meningkatkan kualitas serta kredibilitas laporan keuangan pemerintah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan fiskal negara. Lebih jauh, kemajuan digitalisasi sistem keuangan publik melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) membuka peluang integrasi pelaporan keuangan secara *real time* dan lintas entitas pemerintahan, sehingga mendukung efisiensi dan konsistensi data keuangan nasional.
3. Hambatan utama yang dihadapi terletak pada perbedaan orientasi mendasar antara akuntansi publik dan akuntansi bisnis. Akuntansi sektor publik berfokus pada akuntabilitas serta pelayanan masyarakat, sedangkan akuntansi bisnis menitikberatkan pada perolehan laba dan efisiensi ekonomi. Selain perbedaan filosofis tersebut, kesenjangan kompetensi aparatur dalam memahami PSAK/IFRS, keterbatasan integrasi sistem informasi akuntansi, serta belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme konvergensi SAP-PSAK menjadi tantangan signifikan yang harus diatasi untuk menjamin keberhasilan implementasi.
4. Dari sisi konseptual, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa reformasi akuntansi pemerintahan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai isu teknis, melainkan juga sebagai proses yang sarat dengan dimensi kelembagaan dan legitimasi. Dari sisi praktis, penelitian ini menawarkan arah strategis bagi penyusunan *roadmap* konvergensi SAP-PSAK yang lebih sistematis dan realistis, dengan menekankan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan regulasi yang konsisten, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan keterpaduan sistem pelaporan keuangan antar entitas pemerintah.

5. Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan studi literatur dan analisis sekunder, sehingga belum memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas penerapan prinsip-prinsip akuntansi bisnis di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan menggunakan pendekatan *mixed methods*, yaitu menggabungkan studi kasus dan survei kuantitatif untuk mengukur sejauh mana konvergensi SAP-PSAK mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta memperkuat tata kelola fiskal di berbagai tingkat pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, F. N. (2025). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Journal of UKMC National Seminar On Accounting Proceeding*, 4(1).
- Dalimunthe, R. A. S. (2025). Tren Akuntansi Islam di Indonesia: Perkembangan, Implementasi dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 62–68.
- Dimaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Gusneli, Sudarmanto, E., & Kartika Devi, E. (2023). Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Standar Akuntansi Internasional Terbaru (IFRS). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 2(03), 205–212.
- Khadafi, M., Fitrah, A., Saqdhah, H., Angkat, N. A., Nabila, R., & Rahma, Z. (2024). Tantangan dan Peluang Akuntansi Syariah di Era Globalisasi. *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1(9), 5684–5690.
- Mardiansah, A., Febrian, D., Maulida, F., Saufura, M., & Yunanda, P. (2025). Paradigm Shift of Accounting Theory and its Adaptation in Business Practice. *International Journal of Asian Business and Development (Metropolis)*, 1(2), 113–120.
- Onesta, R. A., Putri, S. R., Naillah, N., Widiawati, S., & Apriliani, A. P. (2025). Akuntansi Keberlanjutan di Indonesia: Tantangan Implementasi dan Perspektif Teori Akuntansi. *Teewan Journal*, 2, 38413848. <https://doi.org/10.62710/phmhps40>
- Otley, D. T. (1980). The Contingency Theory of Management Accounting: Achievement and Prognosis. *Accounting, Organizations and Society*, 5(4), 413–428.
- Parapat, E. P. S., Siringo-ringo, E. D., & Siahaan, J. (2025). Kerangka Audit Real-Time Berbasis Blockchain untuk Tata Kelola Keuangan Sektor Publik di Indonesia: Studi Kasus Tantangan Implementasi IPSAS dan Reformasi Kelembagaan. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 318–331.
- Pratama, H. A., & Mutmainah, S. (2025). Perkembangan Akuntansi Akrua pada Sektor Publik: Analisis Bibliometrik. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 6(1), 19–37.
- Pratama, P., & Maulina, Isra. (2025). Tinjauan Literatur Perkembangan Akuntansi Sektor Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *J-MABISYAH*, 6.
- Purba, T. S. A., Dormeska Simbolon, R., Simbolon, A. M., Sianipar, Y. S., & Aruan, H. M. G. P. (2025). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. *Ecotal and Digital Business Journal*, 6(2), 1322–1330.

- Rajagukguk, G. P. J., Lestari, Maria, Harmain, H., & Hamidah. (2025). Evolusi Teori Akuntansi Sektor Publik: Analisis Perkembangan Dan Tantangan Di Era Digital. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations, 5th Edition*. Free Press.
- Sania, F., Riskiya, H., Rizka, L., Firdaus, M., Putra, D., Rahmadani, R., & Asitah, N. (2025). Artikel Nusantara Entrepreneurship and Management Review. *NEMR*, 3(1), 10–18.
- Sihaloho, P. A. (2024). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Medan*.
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *The Academy of Management Review*, 20(3), 571.
- Tanregudio, H. (2024). Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1.